

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN BERBASIS BERPIKIR KRITIS (PBBK) DALAM MENYIKAPI PERMASALAHAN SOSIAL AKIBAT PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Marianus Mantovanny Tapung¹ & Marselus Ruben Payong²

¹Fakultas Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Jl. Jend. Ahmat Yani, No. 10, Ruteng, Flores 86508

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,
Jl. Jend. Ahmat Yani, No. 10, Ruteng, Flores 86508
e-mail: mtmantovanny26@gmail.com

Abstract: *Reconstruction of Education Based on Critical Thinking in Achieving Sosial Problems Due To Use of Sosial Media in The Junior High School Curriculum.* From the negative side, the development of information technology has succeeded in creating a fairly high sosial level among young Indonesians. This happened, apart from the fact that the level of media literacy was still low, also because educational facilities were based on thinking that was not fully integrated. In fact, one of the potential possessed by young people including junior high school students is the ability to think critically. Given this, by learning from developed countries, one way to avoid students and society from using sosial media is the integration of education assistance in schools. With the existence of education based on critical thinking students can have the knowledge, attitudes and skills to solve various sosial problems, which is one reason for the use of sosial media that is not critical. Many studies that discuss education are based on criticism about this to be integrated into the curriculum system, material content and implementation of classroom learning. To help stakeholders in integration, it is necessary to support education based on critical thinking. Based on the method, besides being based on the reality of learning in digital, the development of digital information technology is also based on the results of a search of various literatures related to education based on critical thinking.

Keywords: reconstruction of education, critical thinking, sosial problems, sosial media

Abstrak: *Rekonstruksi Pendidikan Berbasis Berpikir Kritis (PBBK) dalam Menyikapi Permasalahan Sosial Akibat Penggunaan Media Sosial pada Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.* Dari sisi negatif, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan permasalahan sosial yang cukup tinggi di kalangan orang muda Indonesia. Hal ini terjadi, selain karena tingkat literasi media yang masih rendah, juga disebabkan karena fasilitas pendidikan yang berbasis berpikir kritis belum terintegrasi secara baik. Padahal, salah satu potensi yang dimiliki oleh orang muda termasuk siswa sekolah menengah pertama adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Mengingat hal ini, dengan belajar dari negara-negara maju, salah satu cara untuk menghindari siswa dan masyarakat dari dampak buruk penggunaan media sosial adalah upaya mengintegrasikan pendidikan berbasis berpikir kritis dalam kurikulum sekolah menengah. Dengan adanya pendidikan berbasis berpikir kritis siswa dapat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial, yang salah satu disebabkan karena penggunaan media sosial yang tidak kritis. Banyak penelitian menegaskan tentang pentingnya pendidikan berbasis berpikir kritis ini untuk diintegrasikan ke dalam sistem kurikulum, konten materi, dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk membantu pemangku kepentingan pendidikan dalam mengintegrasikannya, maka perlu rekonstruksi gagasan tentang pendidikan berbasis berpikir kritis ini. Adapun metode rekonstruksi gagasan, selain didasarkan pada kenyataan faktual mengenai kondisi riil pembelajaran di tengah perkembangan teknologi informasi digital, juga berdasarkan pada hasil penelusuran terhadap berbagai literatur yang berkaitan erat dengan pentingnya pendidikan berbasis berpikir kritis.

Kata Kunci: rekonstruksi pendidikan, berpikir kritis, permasalahan sosial, media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan internet sudah merambah begitu pesat di Indonesia, terutama di kalangan orang muda. Data BPS pada bagian Statistik Pemuda 2016 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet pemuda, tertinggi pada kelompok umur 16-18 tahun, yaitu sebesar 62,32 %; disusul kelompok umur 19-24 tahun sebesar 56,88 %, dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 41,00 %. Telepon seluler menjadi primadona utama pemuda untuk mengakses internet, terutama media sosial. Sebanyak 94,07 % pemuda mengakses internet melalui telepon seluler, 35,63 % melalui laptop, *notebook*, atau tablet, 26,51 % melalui komputer/PC, 3,16 % melalui media lain. Sebagian besar orang muda mengakses internet dengan tujuan bersosial media (*facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain sebagainya) sebesar 88,35 %; dan mendapatkan informasi atau berita sebesar 75,02 %. Angka-angka ini tentu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dikaitkan dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, penggunaan media sosial menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian dapat disimpulkan, sekitar 83 % permasalahan sosial seperti ujaran kebencian, tawuran, persekusi, pornografi, pornoaksi, tindakan radikal, dan lain sebagainya yang terjadi di kalangan orang muda disebabkan karena penggunaan media sosial. Tentu, hal ini sangat mencemaskan bagi semua pihak. Karena itu, sikap dan berpikir kritis perlu diberdayakan sebagai pintu masuk untuk bisa menekan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial tersebut.

Dalam konteks Indonesia, upaya merekonstruksi gagasan tentang Pendidikan Berbasis Berpikir Kritis (PBBK) menjadi sangat aktual dan relevan karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial sebagai dampak buruk penggunaan media digital. Situasi bangsa Indonesia dengan peringkat permasalahan sosial

yang cukup tinggi sangat membutuhkan fasilitas pemecahannya. Sesungguhnya, dalam sejarah pembentukan peradaban manusia, aktivitas pendidikan menjadi fasilitas yang sangat strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, upaya merekonstruksi gagasan pendidikan berbasis berpikir kritis menjadi hal yang mendesak, selain melalui kajian empirik-faktual, juga melihat kembali literatur-literatur yang memuat berbagai gagasan penting dan mendalam mengenai pendidikan berbasis berpikir kritis. Rekonstruksi gagasan ini bertujuan agar para pemangku pendidikan dan para pelakunya dapat menyadari tentang pentingnya pendidikan berbasis berpikir kritis untuk diintegrasikan dalam sistem kurikulum dan konsep atau praksis pendidikan. Dari segi psikologi usia belajar, kurikulum, dan materi pembelajaran yang ada di Indonesia, sekolah menengah pertama menjadi tempat yang potensial dan relevan dalam mengintegrasikan pendidikan berbasis berpikir kritis ini, terutama ketika dihubungkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul sebagai akibat penggunaan media sosial.

Beberapa negara di kawasan Amerika, Eropa, dan Asia telah membahas pendidikan berbasis berpikir kritis dengan begitu intensif. Bahkan mereka cukup progresif mengintegrasikan dan menerapkan pendidikan berbasis berpikir kritis dalam sistem kurikulum, materi, dan praksis pembelajaran, sejak mulai tingkat usia belajar yang paling rendah sampai pada pendidikan tinggi. Setelah dievaluasi, kebijakan penerapan dan pengintegrasian pendidikan berbasis berpikir kritis ini, selain memberi dampak yang positif bagi pengembangan karakter kritis peserta didik, lebih penting, yakni semakin berkurangnya permasalahan sosial yang diakibatkan karena penggunaan media sosial. Ketika pendidikan berbasis berpikir kritis ini diterapkan, selain tujuan instruksional tercapai, di mana peserta didik memiliki penguasaan yang baik dari segi

pengetahuan, juga tujuan nurturan muncul dengan baik, di mana peserta didik memiliki sikap dan keterampilan kritis dalam penggunaan media sosial, serta bagaimana mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkan.

METODE

Sebagai sebuah rekonstruksi gagasan, artikel ini menggunakan metode kajian literatur dan cermatan fenomenologis yang dilakukan dengan cara, (1) Membuat pengamatan terhadap kenyataan empirik mengenai fenomena penggunaan internet (media sosial) pada dunia orang muda Indonesia. Selain itu, tim penulis mendalami fenomena pembelajaran berbasis berpikir kritis di sekolah menengah pertama, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. (2) Untuk membantu pemaknaan terhadap fenomena tersebut, tim penulis membuat analisis terhadap berbagai

PEMBAHASAN

Dalam alur rekonstruksi gagasan, tim penulis membagi bagian pembahasan ini dalam tiga pokok penting, yaitu (1) Gambaran empirik tentang pentingnya praksis Pendidikan Berbasis Berpikir Kritis (PBBK) di era informasi digital; (2)

Gambaran Empirik tentang Pentingnya PBBK di Era Informasi Digital

Tim penulis membuat kajian terhadap beberapa hasil penelitian empirik, baik tingkat internasional maupun tingkat lokal untuk mendapatkan gambaran tentang praksis PBBK. Kajian tersebut memberi jawaban terhadap dua hal, yakni (1) apakah PBBK penting untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama, dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang salah satu penyebabnya adalah media sosial?; (2) apakah praksis PBBK

Dengan demikian, permasalahan dapat ditekan dan kehidupan sosial semakin nyaman. Keadaan ini berdampak pada tidak terganggunya rencana pembangunan yang sudah diprogramkan oleh negara.

literatur, yang tentunya berkaitan dengan konten bahasan artikel. Dalam hal ini, literatur yang dianalisis berkaitan dengan tema pembelajaran, konsep-konsep berpikir kritis yang dipelajari secara cermat. Selanjutnya, berdasarkan kajian-kajian terhadap literatur tersebut, tim penulis membuat elaborasi sehingga membentuk struktur dan sistematika berpikir yang komprehensif dalam membahas materi artikel ini. Tim penulis mengelaborasi beberapa pemikiran yang aktual dan relevan tentang berpikir kritis, dan selanjutnya dikorelasikan dengan fenomena pembelajaran yang terjadi pada usia belajar siswa sekolah menengah pertama.

Berpikir kritis sebagai bagian integral pendidikan; dan (3) Berpikir kritis dan rekonstruksi pembelajaran yang membebaskan. Dalam pembahasan, tentu dua bagian ini memiliki keterkaitan, yang tidak terlepas dari rekonstruksi gagasan tentang pembelajaran berbasis berpikir kritis pada sekolah menengah pertama.

sudah efektif diterapkan di sekolah menengah pertama? Dua hal ini menjadi titik pijak bagi tim penulis melakukan rekonstruksi gagasan tentang pendidikan berbasis berpikir kritis ini.

Tim penulis mengawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Yang SC dan Chung TY (2009) pada salah satu SMP di Taiwan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengembangan keterampilan berpikir kritis di kelas IX-X SMP sangatlah tepat dan efektif dalam membantu memecahkan masalah yang menerpa diri dan masyarakatnya. Ketika pembelajaran secara intensif

memberdayakan kemampuan berpikir kritis, maka peserta didik akan memiliki peningkatan kemampuan dalam hal mengidentifikasi, menganalisis, menemukan kebenaran, membuat keputusan, dan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan sosial. Salah satu penyebab tingginya masalah sosial di Taiwan adalah penggunaan media sosial yang tidak cerdas. Namun, ketika PBBK ini diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran, permasalahan sosial di lingkungan sekolah seperti ujaran kebencian, tawuran, persekusi, pornografi, pornoaksi, tindakan radikal, dll, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Perkembangan positif di lingkungan sekolah ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang lebih nyaman dan terkendali.

Penelitian di Taiwan ini telah diafirmasi oleh penelitian Genal Hove (2011) di Newcastle AS yang mengungkapkan bahwa 79 % siswa di kelas eksperimen mengalami peningkatan dalam berpikir kritis, sementara kelas kontrol cuma mencapai 21 %. Hasil statistik ini didukung dengan hasil kualitatif terhadap tingkat partisipasi siswa di kelas eksperimen, di mana siswa mengalami peningkatan beberapa dimensi atau standar dalam berpikir kritis, seperti kejelasan, presisi, akurasi, relevansi, kedalaman, dan kemampuan mengambil simpulan. Hove menyimpulkan bahwa siswa SMP memiliki potensi yang kuat dalam berpikir kritis. Selanjutnya, Hove menegaskan bahwa bila diberdayakan secara optimal melalui pembelajaran, sikap kritis peserta didik akan menjadi kekuatan dalam menyikapi berbagai perkembangan, termasuk perkembangan dalam bidang teknologi informasi. Dalam beberapa masa, penggunaan media sosial yang tidak kritis oleh orang muda di Newcastle telah berdampak buruk pada kehidupan personal dan sosialnya. Banyak masalah sosial, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, yang ditimbulkan akibat penggunaan media sosial yang tidak kritis,

sehingga berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Tentu, kondisi ini membuat prihatin para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan. Dengan argumentasi yang rasional, mereka merumuskan kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan berbasis berpikir kritis dari tingkat dini sampai pendidikan tinggi. Bahkan untuk mendukung kebijakannya, mereka menyertakan program literasi media sosial yang intens pada hampir setiap kegiatan pendidikan formal, in-formal dan non-formal. Hasilnya sesuai yang diharapkan, yakni secara perlahan permasalahan sosial di lingkungan sekolah dapat ditekan, penyakit dan penyimpangan sosial di masyarakat dapat dikontrol secara lebih mudah.

Selain itu, penelitian dilakukan oleh Payong dan Tapung (2017) tentang pembelajaran pada SMP di Kota Ruteng, Manggarai, Flores, NTT menunjukkan kenyataan sebaliknya. Kondisi pembelajaran pada SMP di Kota Ruteng belum sepenuhnya berbasis berpikir kritis dalam menangani permasalahan sosial. Misalnya, survei yang dilakukan pada bagian kegiatan pembelajaran inti menunjukkan bahwa 42,22 % dari 450 siswa berpendapat guru “tidak pernah” melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang keterampilan berpikir kritis; 33,73 % siswa berpendapat “jarang”, 24,04 % siswa berpendapat “kadang-kadang”. Sementara di pihak guru, 36,84 % dari 38 orang mengatakan bahwa “tidak pernah” melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang keterampilan berpikir kritis, 27,37 % mengatakan “jarang”, dan 35,79 % mengatakan “kadang-kadang”.

Data penelitian ini berkorelasi positif dengan fenomena munculnya berbagai degradasi sikap dan moral yang terjadi di kalangan anak usia belajar sekolah menengah. Informasi tentang banyaknya kejadian degradasi sikap dan moral ini merupakan hasil dari *Focus*

Group Discussion bersama beberapa guru mata pelajaran di SMP se-kota Ruteng yang diadakan pada bulan April 2017 (Payong & Tapung, 2017). Menurut para guru, ada 5 dari 10 siswa setiap kelas pada sekolah yang ada di kota Ruteng terlibat dalam tindakan-tindakan destruktif seperti ujaran kebencian, kekerasan verbal, tawuran, persekusi, pornografi, pornoaksi, tindakan radikal, dll. Menurut mereka, sekitar 82-86 % (sejalan dengan data BPS 2016) tindakan-tindakan destruktif ini disebabkan karena pengaruh perkembangan teknologi informasi, seperti fasilitas media sosial (*facebook*). Kontribusi yang negatif, baik secara manifest maupun laten dari media sosial terhadap kehidupan orang muda di kota Ruteng sangat dibantu oleh rendahnya sikap dan keterampilan berpikir kritis. Orang muda begitu mudah tergiring, terprovokasi, bahkan teragitasi oleh informasi yang tersebar di media sosial. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan merusak yang melampaui batas-batas etika moral yang telah ditetapkan oleh masyarakat, sekolah, dan agama.

Hasil penelitian di atas memberi gambaran bahwa pembelajaran pada tingkat SMP di Kota Ruteng belum sesuai dengan salah satu tujuan konsep dan praksis pembelajaran di sekolah menengah, yakni siswa harus dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidupnya. Padahal secara teoretik, kegiatan pembelajaran harus menjadi fasilitas kritik sosial dan sebagai media pengembangan kritisitas terhadap isu-isu sosial dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran yang memberdayakan keterampilan berpikir kritis akan menjadi basis pembentukan karakter bangsa yang kuat. Dengan demikian, masyarakat menjadi semakin beradab dan terhindar dari segala bentuk permasalahan sosial yang dapat mengganggu kehidupan serta

memperlancar pembangunan dalam segala bidang, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari FGD tersebut, yakni (1) pengintegrasian pendidikan berbasis berpikir kritis sangat mendesak untuk dilakukan. Para pemangku kepentingan pendidikan mesti melihat permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai akibat dari penggunaan media sosial yang tidak kritis, sebagai dasar pembuatan kebijakan strategis mengenai pendidikan berbasis berpikir kritis. Pendidikan harus menegaskan perannya sebagai fasilitas kritis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang kerap mengganggu kelancaran program pembangunan negara dan bangsa. (2) Literasi media sosial harus terus digalakan dan diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan dan atau pembelajaran, baik secara formal di sekolah-sekolah, maupun informal dan non formal di keluarga, masyarakat, dan tempat-tempat kursus atau pelatihan. Literasi ini menjadi penting untuk memelekkkan peserta didik dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang kritis, cerdas, arif, dan bijaksana. Unsur-unsur literasi dapat dielaborasi dalam sistem kurikulum, konten materi ajar, model dan strategi pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, serta sistem evaluasi belajarnya. (3) Perlu adanya sinergisitas peran keluarga, masyarakat, agama dan sekolah dalam membuat sosialisasi, edukasi dan advokasi tentang dampak-dampak perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka sistem kontrol terhadap kegiatan dan perkembangan kehidupan siswa berjalan lebih efektif dan efisien, terutama berhubungan dengan perkembangan belajar, relasi dengan sesama, dan responnya terhadap perkembangan teknologi informasi digital.

Berpikir Kritis Merupakan Bagian Integral Pendidikan

Berpikir kritis merupakan salah satu dari empat karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21, yakni komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas (Zevin, 2007:21-22). Sementara itu, berpikir kritis juga menjadi tuntutan ketika masyarakat dunia abad 21 ini mendapat tantangan besar dan kuat. Delors (1996) dalam *Learning: The Treasure Within* mengangkat beberapa macam ketegangan yang kasat mata pada masyarakat abad ini, seperti ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi, antara universalitas dan individualitas, antara tradisi dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara akselerasi/ekspansi pengetahuan dan daya serap manusia, dan antara spiritual dan material. Berbagai ketegangan ini menuntut seseorang untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas, serta keterampilannya dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang menjadi dampak dari berbagai ketegangan dan masalah. Untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dan benar, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing, mampu berpikir dan bersikap rasional, kritis, solutif, alternatif, konstruktif, dan transformatif.

Menurut Kinch (1974, 13-16) dalam buku *Sosial Problems in the World Today's*, permasalahan sosial ini secara faktual berdampak sistemik pada goyah dan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, bencana alam, ledakan penduduk, kerusakan alam, dan lain-lain adalah masalah-masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari kecanggihannya arus globalisasi. Dalam hal ini, tidak ada jalan untuk bisa terlepas dari berbagai masalah tersebut, kecuali *stakeholder* bangsa harus melakukan kajian-kajian dan tindakan-tindakan praktis (Gelder, 2005).

Demi mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk para pelaku pendidikan perlu bekerja sama secara sinergi.

Pendidikan dalam segala perangkat dan bentuk kegiatannya menjadi salah satu andalan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial di negara ini. Untuk diketahui, banyak negara di dunia ini, termasuk negara-negara berkembang yang bisa mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan sosial di negaranya, ketika pendidikan diberdayakan secara optimal. Asumsinya, ketika pendidikan suatu negara maju maka peluang untuk memecahkan berbagai masalah akan sangat cepat, efektif, dan efisien (Allen, 1987:56-58). Pendidikan menjadikan para subjek didik (siswa) menjadi cerdas, memiliki kompetensi, kemampuan teknis dan sosial, *hard skills* dan *soft skills*, mampu berpikir kritis, yang dapat diberdayakan dan dimanfaatkan untuk membuat analisis, sintesis, evaluasi, memberi keputusan dan solusi terhadap berbagai persoalan, baik dalam dirinya, maupun lingkungan sosialnya (Newmann, 1991:324-326).

Menurut Henderson & Hurley (2013: 248), pendidikan dan praksis pembelajaran yang memberdayakan kemampuan berpikir siswa (*students enhancing critical thinking skills*) akan berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial yang kuat untuk satu negara, termasuk terlibat dalam berbagai upaya memecahkan berbagai permasalahan sosial (*social problems*). Senada dengan itu, Halx & Reybold (2005:294) menegaskan bahwa pendidikan memiliki kekuatan penting untuk memecahkan berbagai persoalan sosial yang menghantui kehidupan masyarakat di dunia berkembang, dengan melibatkan siswa dalam mengatasinya. Cara yang paling

tepat adalah memberdayakan kemampuan-kemampuan kritisnya.

Menurut Bertrand Russel dalam artikelnya yang berjudul *Education for Democracy* (1939:530), bangsa yang kuat tatanan sosialnya tidak terlepas dari upaya pendidikan dalam membangun karakter kritis (*critical character building*) dalam diri warganya, yang secara praksis ditumbuhkembangkan dalam diri siswa-siswa sekolah. Siswa-siswa akan menjadi manusia rasional dan kritis untuk membahas berbagai kepentingan-kepentingan pembangunan Negara demokrasi, termasuk memecahkan masalah-masalah sosialnya. Hal ini selaras dengan pikiran Habermas (2002:19) dalam bukunya *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity* bahwa yang menjadi bagian dari penyebab munculnya berbagai masalah sosial dan sulit untuk keluar dari masalah-masalah tersebut adalah bentuk-bentuk irasionalitas warga masyarakatnya. Menurut Habermas (Eriksen, 2004:78), masyarakat yang rasional kritis mesti dibangun untuk mengatasi berbagai bentuk irasionalitas tadi, dengan pendidikan dan pembelajaran kritis di sekolah-sekolah. Pengetahuan dan sikap kritis siswa dibentuk sedemikian rupa dan menjadikan mereka terdepan untuk melakukan transformasi. Karena itu, perlu dibangun cara belajar emansipatoris yang memberi ruang bagi tumbuh kembangnya berpikir kritis.

Konsep dan praksis pendidikan kritis dilandaskan pada suatu pemahaman bahwa pendidikan terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, komunikasi-informasi, kultural, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Institusi pendidikan tidaklah netral, independen, dan bebas dari pelbagai kepentingan, tapi

malah menjadi bagian dari institusi sosial lain yang menjadi ajang pertarungan kepentingan. Pendidikan harus dipahami dalam kerangka relasi-relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan ideologi (Ira Shor, 1945). Pelbagai kepentingan inilah yang akan membentuk wajah institusi pendidikan dan memengaruhi subyektivitas peserta didik. Harus disadari, subyektivitas manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang lebih luas. Subyektivitas manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang dibaca dan dipelajari, lingkungan sekolah tempat manusia belajar, lingkungan sosial tempatnya berinteraksi, lingkungan keluarga tempat dia tinggal, sistem informasi, sistem politik yang mengatur kehidupan publik, dan entitas-entitas lain yang turut membentuk dan mempengaruhi kesadaran individu.

Dalam konteks di atas, perlu membangun kesadaran kritis peserta didik agar mereka mampu mendemistifikasi kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas. Kesadaran kritis merupakan kata kunci yang sangat penting, sebab penindasan, dominasi, dan eksploitasi itu berlangsung karena terdegradasinya kemampuan kritis pada manusia (Kincheloe, 2008). Kemampuan kritis di sini adalah adalah model berpikir yang mampu menyingkap fenomena-fenomena tersembunyi atau melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan pengetahuan umum (*common sense*). Kesadaran kritis ini tidak bisa dengan cara didepositokan dari luar, tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam peserta didik sendiri. Dalam hal ini, kesadaran kritis tidak dapat dicangkokkan, tapi dibangun lewat kesadaran diri peserta didik.

Berpikir Kritis dan Rekonstruksi Pembelajaran yang Membebaskan

Gagasan tentang pendidikan kritis dan berpikir kritis dapat dilihat dari

dialektika pemikiran antara mazhab Frankfurt dan Postmodernisme (Callawaert, 1999; Morrison, 1995). mazhab Frankfurt memiliki gagasan dan keyakinan bahwa proyek modernisme

bertitik tolak pada asumsi perlunya meletakkan fondasi dasar bagi kehidupan masyarakat modern dengan bertumpu pada universalisme akal, hak, dan otonomi individu. Sementara itu, postmodernisme, kebalikannya, tidak meyakini apa yang disebut dengan universalisme, yang ada adalah partikularitas, pluralitas, dan keragaman. Mazhab Frankfurt melihat kebenaran sebagai suatu yang sifatnya tetap dan tidak mungkin dapat dirubah lagi. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang tetap dan memayungi segala bentuk pergerakan kehidupan manusia. Sementara, postmodernisme menegaskan bahwa tidak ada kebenaran sejati karena yang disebut dengan kebenaran itu hanyalah interpretasi manusia atas realitas itu sendiri. Kebenaran merupakan hanyalah hasil konstruksi bahasa manusia. Dengan demikian, postmodernisme menganut paham relativisme.

Merujuk pada dialektika ini, pendidikan kritis mengambil unsur-unsur konstruktif dari mazhab Frankfurt dan postmodernisme, yang kemudian diadaptasi untuk merancang satu bentuk pendidikan yang membebaskan dan kritis. Pendidikan yang membebaskan dan kritis dijadikan sebagai medium bagi kritik sosial sekaligus mampu menawarkan kemungkinan-kemungkinan dikembangkannya ruang publik demokratis (*democratic public spheres*) (Morrison, 2003; Thahjadi, 2004). Dua hal yang ditekankan dalam mazhab ini adalah pemberdayaan diri (*self-empowerment*) dan refleksi diri (*self-reflection*) sebagai titik tolak untuk melakukan transformasi sosial dengan berpihak kepada yang lemah (*powerless*).

Salah satu tema pokok mazhab pendidikan kritis adalah tentang kapitalisme karena pengaruhnya yang besar dalam kehidupan masyarakat modern. Apa yang dilahirkan dari rahim kapitalisme adalah *culture of positivism* dan rasionalitas teknokratik atau instrumental, satu bentuk budaya dan model berpikir yang berpengaruh atas laju

arah pendidikan (Brubacher, 1974:78). Ilmu yang disampaikan kepada peserta didik dalam budaya ini adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat industri. Proses pembelajaran pun ditekankan pada upaya untuk mengakumulasi dan memiliki ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengejar profit. Pembelajaran sebagai arena imposisi pengetahuan dari mereka yang menganggap tahu segalanya kepada mereka yang tidak mengetahui apa-apa (Calhoun, 1995). Lebih dari itu, dalam budaya positivisme, pengetahuan cenderung dipisahkan dari proses pembentukannya. Seolah-olah keduanya bisa dipisahkan. Pengetahuan dianggap seperti “barang jadi” yang siap ditelan peserta didik tanpa melalui proses seleksi dan refleksi bersama. Padahal kalau kita memakai perspektif Paulo Freire (1984) dalam *The Gnosiological Cycle of Knowledge*, proses pembentukan pengetahuan itu secara dialektis berkaitan erat dengan proses penerimaan (Delgaauw, 1988). Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, maka pembelajaran sama saja mengabaikan unsur-unsur penting yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik, seperti refleksi kritis, keingintahuan (*curiosity*) dan dialog.

Karena itu, pembelajaran yang ditekankan dalam pendidikan kritis adalah bagaimana memahami, mengkritisi, memproduksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas hidup dan mengubahnya. Metode yang dipakai adalah kodifikasi dan dekodifikasi. Kodifikasi mengacu pada proses merepresentasikan fakta yang diambil dari kehidupan peserta didik dan kemudian mepermasalahkannya (*problematizing*). Dekodifikasi adalah proses pembacaan atas fakta-fakta tersebut melalui dua metode, yakni deskriptif dan analitis. Tahap deskriptif digunakan untuk memahami, meminjam istilah Chomsky (1978), “surface structure”, sedangkan tahap analitis digunakan untuk memahami,

“deep structure”. Dua metode itulah yang dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami relasi-relasi antarkategori (ideologi, ras, gender, kelas) dalam memahami realitas, termasuk dunia pendidikan.

Perspektif pendidikan kritis menunjukkan sekolah diyakini telah memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural (Banks, 1993). Sekolah adalah media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial. Sementara itu, guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Ia bukan satu-satunya sumber pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. Dia bukan pemilik tunggal kelas. Hubungan guru-murid bukanlah bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik yang mengidentifikasi atasan-bawahan atau manajer-buruh, tapi bersifat horizontal dan egalitarian. Isi dan materi pembelajaran dalam pendidikan kritis tidak semata-mata hak prerogatif guru, kepala sekolah, atau para ahli, tanpa melibatkan peserta didik. Pendekatan *bottom up* dan partisipatif lebih dipilih dalam mengkonstruksi kurikulum pembelajaran dengan menjadikan kehidupan peserta didik sebagai titik pijak.

Proses pembelajaran dalam pendidikan kritis lebih menekankan pada aspek ‘bagaimana berpikir’ (*how to think*) daripada ‘berpikir apa’ (*what to think*). Penekanan pada aspek *what to think* atau materi pembelajaran itu penting, tapi proses atau metodologi untuk mendekati materi itu lebih penting (Supardan, 2015; Bean, 1996). Dengan demikian, proses berpikir, berdebat, berargumentasi, mengapresiasi pendapat orang lain, selama masa pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pelajaran itu sendiri. Karena dalam proses itulah akan terjadi kritisisme, *sharing ideas*, saling menghargai dan penilaian serta evaluasi terhadap pengetahuan. Penekanan aspek *how to think* akan bisa terlaksana jika metode yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah metode dialogis,

bukan metode ceramah. Dialog merupakan sarana humanis, sarana untuk menemukan jati diri sebagai manusia, sarana untuk memanusiakan manusia (Glaser, 1991). Namun, tetap saja harus diingat, dialog apapun tentang suatu pengetahuan atau nilai di kelas harus steril dari upaya untuk mencapai konsensus. Hal ini dimaksudkan agar ada kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir lewat perspektifnya.

Kegiatan dialog yang menghasilkan akan menuju pada proses berkembang kesadaran (*conscientization*) (Freire, 1984). Konsientisasi adalah proses dimana manusia mempunyai kesadaran kritis (*critical awareness*) sehingga mampu melihat secara kritis berbagai kontradiksi, penyimpangan dan ketimpangan sosial yang ada di sekelilingnya dan kemudian ada kesadaran untuk berupaya mengubahnya (Henderson, 2013). Pendidikan kritis menganggap bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik, dari kesadaran magis dan naif, menuju kesadaran kritis. Demi mendukung peningkatan kesadaran, ada tiga tahapan dasar dalam pendidikan (Gelder, 2000), yaitu (1) *Naming*, yaitu tahap menanyakan sesuatu: *what is the problem?* Tahap ini merupakan latihan untuk mempertanyakan sesuatu, baik itu berkaitan dengan teks, realitas sosial ataupun struktur ekonomi-politik. (2) *Reflecting*, yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar untuk mencari persoalan: *why is it happening?* Tahap ini dimaksudkan agar murid dibiasakan untuk tidak berpikir simplistik, tapi berpikir kritis dan reflektif. (3) *Acting*, yaitu proses pencarian alternatif untuk memecahkan persoalan: *what can be done to change the situation?* Hal ini merupakan tahapan praksis. Memang, refleksi dan aksi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam pendidikan kritis (*critical pedagogy*). Ketiga tahap ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan.

Sudah pasti tahapan-tahapan di atas menuntut pembiasaan dan pemberdayaan yang intens dalam diri peserta didik. Pembiasaan dan pemberdayaan ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya berpikir kritis merupakan salah satu model aktivitas kognitif yang menuntut keterampilan yang tinggi dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya. Dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis ini sudah dilansir sebagai salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter manusia dan keadaban masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia yang memiliki potensi intelektual, memungkinkan dia bisa berpikir dalam mencermati kehidupannya dan kehidupan masyarakatnya. Dalam perjalanan sejarah peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis merupakan salah satu kekuatan dalam mengonstruksi kehidupan sosial yang baik.

Kemampuan kritis siswa sangat penting sebagai bagian dari pembentukan karakter sebagai warga negara yang baik, seperti yang diungkapkan oleh McLaren (1995:17), *“Sosial critical thinking is necessary for student to achievement of good citizenship in a free society. Good citizenship involves responsibility to be an informed and rational participant in civic affairs, which implies capability to think critically about public issues, candidates for public office, and decisions of government officials”*. Berpikir kritis sangat bermanfaat untuk mengusahakan terbentuknya kewarganegaraan yang baik dalam suatu masyarakat yang bebas. Selain mampu berpikir kritis, sebagai warga negara yang baik, siswa bertanggung jawab untuk menjadi pemberi informasi yang rasional dalam mengurus hal-hal berkaitan masyarakat. Dalam hal ini, setiap siswa dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang isu-isu publik dan berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Keterampilan berpikir kritis tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses

pendidikan dan pembelajaran, baik dilakukan di sekolah maupun di masyarakat. Sekolah yang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis sangat membantu untuk bertumbuh dan berkembangnya keterampilan berpikir kritis, seperti yang diungkap oleh Ennis (1985, 45-48): *“Lessons that stimulate questions and sosial criticism in pursuit of truth, which are commensurate with the cognitive and personal development of students. Strategies and skills in sosial critical thinking are keys to independent judgment and learning. Students gain enduring intellectual abilities, which can be used long after particular facts have been forgotten. They are empowered as learners and as citizens to think and act more effectively”*.

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah siswa dirangsang untuk dapat mengajukan pertanyaan dan kritik demi mendapatkan kebenaran, sesuai dengan perkembangan kognitif dan pribadi siswa (Fisher, 2001). Dalam hal ini, strategi dan keterampilan berpikir kritis merupakan kunci untuk pembelajaran dan penilaian yang independen. Siswa memperoleh kemampuan intelektual yang stabil, yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi kembali fakta-fakta tertentu yang telah lama dilupakan. Siswa diberdayakan sebagai peserta didik dan sebagai warga negara untuk berpikir dan bertindak lebih efektif. Dalam hal ini, sebagai warga negara yang baik dan benar, siswa SMP turut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan-permasalahan bangsa dan negaranya (Martoella, 1976). Tanggung jawab ini menuntut seorang siswa untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilannya dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang menjadi dampak dari berbagai ketegangan ini. Untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dan benar maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing, mampu berpikir dan bersikap rasional, kritis, selektif, positif, solutif,

alternatif, konstruktif, inovatif, dan transformatif.

KESIMPULAN

Dalam konteks rekonstruksi gagasan, para penulis menegaskan beberapa simpulan penting tentang urgensi dan relevansi PBBK ini dalam kurikulum di SMP. *Pertama*, dalam konsep berpikir kritis terkandung unsur-unsur yang senantiasa mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking*). Berpikir kritis berarti mampu menghubungkan pengetahuan, ide, dan gagasannya dengan kenyataan-kenyataan sosial, terutama bagaimana memecahkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini permasalahan sosial yang merupakan dampak buruk penggunaan media sosial yang tidak kritis. *Kedua*, Pengembangan-pengembangan berpikir kritis, menagih kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam diri seseorang. Usia belajar sekolah menengah sangat relevan dan cocok untuk mengembangkan model kemampuan berpikir kritik ini. Pemberdayaan dan penguatan atas kemampuan-kemampuan ini dapat memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai kondisi dan situasi masyarakat di sekitarnya. Pada level teknis aplikatif, dengan keterampilan berpikir kritiknya, siswa SMP mampu mengeksplorasi, mengakomodasi, mengelaborasi dan mengkonfirmasi

berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. *Tiga*, literasi media merupakan salah satu cara untuk memberdayakan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Menyertakan program literasi media dalam perencanaan dan praksis pembelajaran di kelas merupakan hal yang mesti dipertimbangkan secara serius. Dengan dukungan literasi media, maka proses pembelajaran yang bertujuan memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan lebih bermakna dan berdaya guna. *Empat*, para guru harus banyak terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan di wadah-wadah kelompok kerja guru, berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen penilaian, metode dan model pembelajaran, sumber atau media yang kontekstual dan relevan. Dengan mengintegrasikan PBBK dalam sistem kurikulum, materi dan kegiatan pembelajaran, maka peluang untuk memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa semakin tercipta. Guru juga harus didukung dengan tingkat literasi media yang mumpuni, sehingga memiliki kepantasan dalam membelajarkan siswa ketika berupaya mengatasi permasalahan sosial yang sebabkan karena berbagai dampak buruk perkembangan teknologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Allen, Robert D, 1987. "Intellectual Development and the Understanding of Science: Applications of William Perry's Theory to Science Teaching." *Journal of The University of North Carolina at Charlotte.*, p. 56-58.
- Banks, J.A. 1993. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon. <https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016.
- Bean, John. 1996. "Helping Students Read Difficult Texts." *Engaging Ideas:*

- The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking, and Active Learning in the Classroom.* San Francisco: Jossey-Bass.
- Brubacher, John S. 1974. *A History of The Problems of Education.* New York and London, McGraw –Hill Book Company, Inc.
- Calhoun, C., 1995. *Critical Sosial Theory.* Cambridge, MA: Blackwell.
- Callawaert, S. 1999. "Philosophy of Education, Frankfurt Critical Theory and The Sociology of Pierre Bourdieu" dalam T. Popkewitz dan L. Fendler (eds), *Critical Theories In Education: Changing Terrains of Knowledge and Politics*, London: Routledge.
- Chomsky, N. 1978. *Human Rights and American Foreign Policy.* New York: Oxford University.
- Dadang, Supardan, 2015. *Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, Jilid 1-2.* Yayasan Rahardja:Bandung.
- Delgaauw, Bernad, 1988. *Filsafat Abad XX.* Yogyakarta: Tiara
- Delors, 1996. *Learning: The Treasure Within,* The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Place de Fontenoy, France.
- Ennis, Robert. H., 1996. *Critical Thinking.* USA :Prentice Hall, Inc/Facione, N.C, & Facione, P.A.
- Fisher, Alec. 2001. *Critical Thinking: Introduction.* UK: Cambridge University Press.
- Freire, Paulo, 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (diindonesiakan oleh Sindhunata), Jakarta: Gramedia.
- Fukuyama, Francis & Samuel P. Huntington, 2005. *The Future of The World Order (Masa Depan Peradaban dalam Cengkeraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme),* Yogyakarta:IRCiSod.
- Glaser, E. M., 1991. *An Experiment in the Development of Critical Thinking.* New York: Columbia University Teacher's College.
- Habermas, Juergen, 2002. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity,* ed. Eduardo Mendieta, MIT Press.
- Halx, M., & Reybold, L. E, 2005. *A Pedagogy of Force: Faculty Perspectives of Critical Thinking Capacity in Undergraduate Students.* The Journal of General Education.
- Henderson-Hurley, M., & Hurley, D, 2013. *Enhancing Critical Thinking Skills Among Authoritarian Students.* International Journal of Teaching and Learning in Higher Education.
- Hove, Genal, 2011. "Developing Critical Thinking Skills in the Senior High School Classroom" Retrieved June 21, 2016 <http://h08.cgpublisher.com/proposals/65/index.html>.
- Ira Shor & Paulo Freire, 1945. *Pedagogy for Liberation.* Bergin dan Garvey Publisher.

- Kinch, J.W., 1974. *Sosial Problems in the World Today's*. London : Addison-Wesley Publishing Company.
- Kincheloe, J.L., 2008. *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*, 3, Springer Science and Business Media B.V.
- Martorella, P.H., Beal, C.M., dan Bolick, 2005. *Teaching Sosial Studies in Middle and Secondary Schools*. Columbus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- McLaren, P., 1995. *Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern Era*. New York: Routledge.
- Morrison, K., 1995. "Habermas and The School Curriculum" Tesis yang tidak diterbitkan. School of Education, University of Durham.
- _____, 2003. "Jurgen Habermas", dalam Joy A. Palmer (ed), *50 Pemikir Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. (Alih bahasa: Farid Assifa) Yogyakarta:Jendela.
- Newmann, F.M. 1991. "Promoting Higher Order Thinking in Sosial Studies:Overview of a study of 16 high school Departments. Theory and Research in Sosial Education, 4(19),324–340.
- Payong,Marsel dan Marianus Tapung, 2017. *Pembelajaran Berbasis Berpikir Kritis di SMP se-Kota Ruteng (sebuah Penelitian Pembelajaran)*. Ruteng: Perennial Institute.
- Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Philosophy*, (terjem.) .Columbus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Sulaiman, W.S.W., Rahman, W.R.A., & Dzulkipli, M.A., 2007. "Relationship Between Critical Thinking Dispositions, Perceptions towards Teachers, Learning Approaches and Critical Thinking Skills among High School Students". Retrieved September 29, 2016, from digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/.../
- Thahjadi, S..P.L. 2004. *Pertualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius.
- Yang SC dan Chung TY, 2009. "Experimental study of Teaching Critical Thinking in Civic Education in Taiwanese Senior HighSchool. Retrieved July 12, 2016, (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17822582>)
- Van Gelder, T., 2000. *The Efficacy of Undergraduate Critical Thinking Courses. A Survey in Progress*. Retrieved October 6, 2016, from <http://www.philosophy.unimelb.edu.au/reason/papers/efficacy.html>
- Zevin, Jack. 2007. *Sosial Studies for The Twenty-First Century; Methods and Materials for Teaching in Middle and Secondary Schools*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.